

BAB II

DINAMIKA KONFLIK KASUS PELANGGARAN HAM OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP MASYARAKAT XINJIANG

2.1 Wilayah Xinjiang

Wilayah Xinjiang atau nama lengkapnya yaitu Daerah Otonomi Xinjiang merupakan sebuah daerah otonomi yang berada di China memiliki luas wilayah 1.660.000 kilometer persegi dengan ibukotanya yaitu Urumqi.⁵⁵ Wilayah Xinjiang memiliki luas sebesar 1,665 juta km², dan menjadi salah satu provinsi terbesar di China yang terletak di sepanjang perbatasan Barat Laut China dengan Urumqi sebagai ibukota wilayah tersebut. Xinjiang menempati posisi unik karena berbatasan langsung dengan Rusia, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan dan Afghanistan.

Terdapat berbagai macam tradisi, budaya serta etnis yang beragam yang mana etnis-etnis tersebut mayoritas beragama islam. Terdapat sekitar 10.000.000 etnis Uighur di China dan setidaknya terdapat 300.000 di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan pada awal abad ke-21. Beberapa suku atau etnis asli di wilayah Xinjiang terdiri dari etnis Uighur, Kazakh, Hui, Tartar, Uzbek, dan Tajik. Sedangkan etnis lain seperti etnis Han, Xibe, Khalkhas, Manchu, Mongol, Daur dan Rusia memeluk keyakinan lain atau tidak memeluk keyakinan apapun. Sehingga dengan keberagaman etnis dan tradisi yang beragam ini membuat

⁵⁵ Baiq L.S.W Wardhani, "Respons China terhadap Gerakan Pan-Uighuris di Xinjiang" *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 2011 (Vol 24, No 4): 292

wilayah Xinjiang juga kaya akan kebudayaan. Etnis Uighur merupakan etnis mayoritas yang beragama islam berbahasa Turki dari pedalaman Asia sejumlah kecil tinggal di republik Asia Tengah dan sebagian besar orang Uighur tinggal di China barat laut Xinjiang.⁵⁶

2.2 Sejarah Peradaban Etnis Uighur di Xinjiang

Pada tahun 1940, Xinjiang, yang sebelumnya dikenal sebagai Turkestan Timur, adalah negara yang merdeka dengan wilayah yang beragam yang terdiri dari pegunungan, gurun, sungai, dan sumber daya alam yang melimpah.⁵⁷ Pada awalnya, orang-orang dari suku Uighur, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan tinggal di wilayah ini. Kemudian Dinasti Qing Manchu China menyerbu wilayah Xinjiang pada tahun 1876. Pada tahun 1949, itu secara resmi menjadi bagian dari China dan menjadi wilayah otonomi pada tahun 1955.

Dibawah kepemimpinan Partai Komunis China, semua kelompok etnis di Xinjiang bersatu dan bekerjasama dengan kelompok lain di seluruh negeri, membuka periode kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Dalam sejarahnya yang panjang, wilayah China telah mengalami periode perpecahan dan penyatuan, namun penyatuan dan perkembangan selalu menjadi tren umum. Kerajaan kecil atau rezim separatis ada di Dataran Tengah pada periode yang berbeda; Demikian pula, Xinjiang juga menyaksikan beberapa rezim lokal memecah belah wilayah tersebut. Namun demikian, tidak peduli berapa

⁵⁶ Nuzlah, 2021, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terdapat Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang, China Periode 2019-2020*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal.25.

⁵⁷ World Uyghur Congress, *East Turkestan*, diakses dalam <https://www.uyghurcongress.org/en/east-turkestan-2/> (25/3/2023, 13:44 WIB)

lama rezim-rezim ini memecah belah Xinjiang dan betapapun seriusnya situasinya, wilayah tersebut pada akhirnya akan bersatu. Pada periode yang berbeda di Xinjiang terdapat negara kota, negara nomaden, kerajaan, kerajaan, khanat, negara bawahan, negara anak sungai dan beberapa bentuk rezim lokal lainnya, seperti 36 negara bagian di Wilayah Barat pada Dinasti Han, Kara-Khanid Khanate dan Kerajaan Uighur Gaochang pada Dinasti Song, Chagatai Khanate pada Dinasti Yuan, dan Yarkant Khanate pada Dinasti Ming. Namun mereka semua adalah rezim lokal yang berada di wilayah China; mereka tidak pernah menjadi negara merdeka. Rezim-rezim lokal ini mempunyai rasa identitas nasional yang kuat, dan mengakui diri mereka sebagai cabang atau pengikut otoritas Dataran Tengah.⁵⁸

Sejak zaman kuno Xinjiang telah menjadi wilayah multi etnis. Sejumlah besar kelompok etnis yang memasuki Xinjiang pada periode berbeda membawa teknologi, budaya dan gagasan, adat istiadat, dan banyak aspek kehidupan mereka ke wilayah tersebut, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui pertukaran dan integrasi. Mereka semua adalah penjelajah Xinjiang. Pada akhir abad ke-19, 13 kelompok etnis yaitu Uighur, Han, Kazakh, Mongol, Hui, Kirgiz, Manchu, Xibe, Tajik, Daur, Uzbek, Tatar, dan Rusia telah menetap di Xinjiang, dan Uighur mempunyai hak untuk tinggal di Xinjiang. populasi terbesar. Kelompok-kelompok etnis telah tumbuh, berkembang dan berinteraksi satu sama lain meskipun terdapat masa isolasi dan konflik, serta berbagi nasib baik dan kesulitan dalam hubungan yang erat. Mereka semua telah memberikan kontribusi

⁵⁸*Masalah Sejarah Mengenai Xinjiang*, diakses dalam http://pk.china-embassy.gov.cn/eng/mlzg/201907/t20190721_1134956.htm (12/15/2023, 12:02 WIB)

penting dalam eksplorasi, pengembangan, dan perlindungan Xinjiang, dan mereka semua adalah penguasa Xinjiang. Saat ini dihuni oleh 56 suku, Xinjiang menjadi salah satu wilayah administratif setingkat provinsi dengan jumlah suku terbanyak di China. Suku Uighur, Han, Kazak, dan Hui memiliki populasi lebih dari satu juta jiwa, sedangkan suku Kirgistan dan Mongol memiliki populasi melebihi 100.000 jiwa. Saat ini, Xinjiang, rumah bagi berbagai kelompok etnis, merupakan bagian integral dari bangsa China.

Awal mula masuknya Islam ke Xinjiang yaitu ketika masyarakat Uighur berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan Barat. Dalam Sejarahnya, wilayah Xinjiang dulu lebih dikenal sebagai “Turkistan Timur”. Nenek moyang utama suku Uighur adalah suku Ouigour pada masa Dinasti Sui dan Tang yang tinggal di Dataran Tinggi Mongolia. Secara historis, Keluarga Ouigour mengalami perbudakan di bawah kekuasaan Turki. Untuk melawan penindasan dan perbudakan oleh Turki, masyarakat Ouigour bersatu dengan beberapa suku Tiele untuk membentuk aliansi suku Ouigour. Selain itu juga dengan adanya bantuan pasukan dari Dinasti Tang, mereka memberontak melawan Khaganate Turki Barat dan mengalahkan Khaganate Turki Timur dan Khaganate Turki Kedua. Pada tahun 744, istana Tang menganugerahkan gelar kepada Kutlug Bilge Khagan, karena berhasil menyatukan suku Ouigour. Pada tahun 788, penguasa Ouigour menulis surat kepada kaisar Tang, meminta agar nama mereka diubah menjadi “Uighur”.

Pada tahun 1934, Xinjiang mengeluarkan perintah pemerintah, yang menetapkan bahwa “维吾尔” (Wéiwú'ěr) akan menjadi nama standar Tiongkok

untuk Uighur, yang untuk pertama kalinya mengungkapkan arti akurat dari “Uighur” untuk menjaga persatuan di antara masyarakat. Namun sejak zaman modern, terdapat motif tersembunyi yang menggambarkan semua orang dalam rumpun bahasa Turki sebagai “orang Turki” mereka adalah pendukung Pan-Turkisme, dengan menggunakan argumen bahwa suku berbahasa Turki terintegrasi dengan nenek moyang Turki setelah bermigrasi ke barat. Di Tiongkok, kelompok etnis yang berbicara bahasa Turki termasuk Uighur, Kazak, Kirgiz, Uzbek, Tatar, Yugur, dan Salar, masing-masing memiliki sejarah dan budaya uniknya sendiri sehingga orang-orang ini tidak bisa disebut sebagai “Turki” karena rumpun bahasa dan kelompok etnis adalah dua konsep yang pada dasarnya berbeda.

2.3 Dinamika Bentuk Pelanggaran Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang

Saat Xinjiang menjadi bagian dari wilayah otonomi China sejak tahun 1955, Pemerintah China mulai melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat disana khususnya terhadap etnis Uighur. Mereka memiliki provinsi otonomi sendiri yang disebut Xinjiang-Uighur. Kebanyakan dari etnis Uighur adalah beragama muslim dan menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Mereka menulis dengan menggunakan tulisan bahasa arab dan berkomunikasi dengan bahasa lokal dan Turkmen.⁵⁹ Kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat Xinjiang, terutama muslim Uighur, telah dilakukan oleh pemerintah setempat selama beberapa dekade sebelumnya, tepatnya dari tahun 1933 hingga 1994.

⁵⁹ Yohanes Soga, *Penegakkan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*, Jurnal Hukum Online (JHO), Vol, 1, No, 2, hal. 497.

Mulai saat pemerintah komunisme China mengambil alih wilayah Turkistan Timur, atau Xinjiang saat ini. Kemudian praktik penindasan dan diskriminasi oleh pemerintah setempat di Xinjiang khususnya etnis Uighur semakin memburuk sejak tahun 2009. Sebagai reaksi terhadap kerusuhan di Urumqi pada tahun 2009.

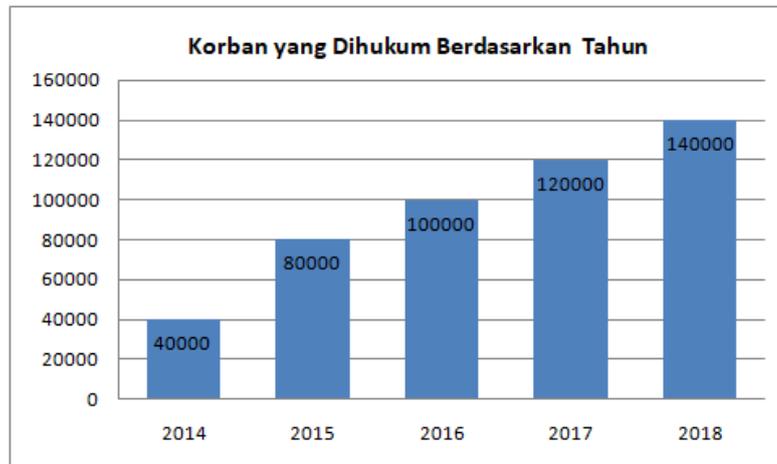
Kemudian pada tahun 2015, terjadi bentrokan etnis serta serangan teroris separatis di wilayah Xinjiang. Sehingga pemerintah China telah menerapkan langkah-langkah keamanan militer, kepolisian yang invasif dan pengawasan komunitas terhadap masyarakat disana khususnya etnis Uighur. Selain itu juga, pemerintah setempat memaksa ratusan ribu orang yang tergabung dalam kelompok teroris masuk ke kamp-kamp atau tempat “pendidikan ulang”, dan secara drastis membatasi bahasa, budaya, dan agama. Oleh pemerintah China telah menerapkan pemantauan, kontrol, dan hukuman yang ketat tanpa memandang bulu dengan menargetkan etnis minoritas di Xinjiang, semuanya dilakukan dengan dalih kebijakan “anti-teror, de-ekstrimisme, dan kontra-separatisme”. Tindakan diskriminasi berdalih keamanan di Xinjiang ini terjadi atas perintah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan Presiden China Xi Jinping, dimana menyatakan pada bulan Mei 2014 akan melakukan kampanye kontra-terorisme nasional, namun sebagian besar berfokus pada wilayah barat China. Pembangunan kamp-kamp penahanan yang menyeluruh di seluruh wilayah Xinjiang yang dimulai sejak 2009, telah meningkat pesat sejak tahun 2016, setelah Presiden China Xi Jinping menunjuk Chen Quanguo sebagai

sekretaris Partai Komunis China yang baru untuk wilayah tersebut.⁶⁰

Kasus pelanggaran tersebut semakin meningkat sejak tahun 2014, ketika Pemerintah China melakukan penangkapan besar-besaran dan percepatan hukuman terhadap masyarakat Xinjiang di kamp-kamp yang dibangun oleh Pemerintah China. Berlanjut pada tahun 2017, berdasarkan laporan dari Pemerintah China bahwa jumlah etnis minoritas yang mengalami kasus pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah China melakukan hal tersebut dengan dalih upaya “kontra-terorisme”, anti-separatisme”, dan de-ekstremisme” oleh pemerintah China telah meningkatkan jumlah penangkapan dan penuntutan di Xinjiang.

Statistik resmi pemerintah China menunjukkan jumlah orang yang mengalami penahanan dan dijatuhi hukuman pada tahun 2017, dan mengalami peningkatan di tahun 2018 mencapai satu juta lebih korban. Seperti yang dilaporkan oleh organisasi non-pemerintah China pada tahun 2019. Berikut ini jumlah korban yang mengalami penahanan dan diskriminasi oleh pemerintah Xinjiang di China:

⁶⁰ Chinese Human Rights Defenders, Criminal Arrests in Xinjiang Account for 21% of China's Total in 2017, diakses dalam <https://www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017/> (12/16/2023, 12:02 WIB)



Sumber: Human Rights Watch (2021)

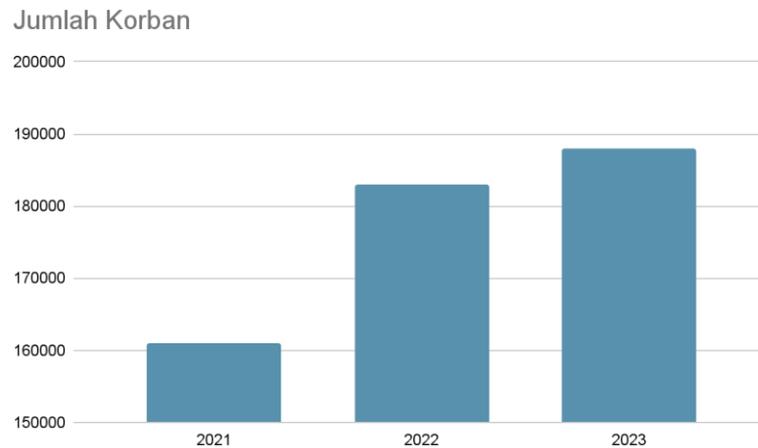
Data diatas berdasarkan buku tahunan hukum China, buku tahunan regional Xinjiang dan laporan kerja tahunan pengadilan China. Menurut statistik pemerintah China, pengadilan Xinjiang menghukum 99.326 orang pada tahun 2017 dan 133,198 orang pada tahun 2018.⁶¹ Terdapat lebih dari 8.000 tahanan berdasarkan laporan keuangan dan dokumen resmi memperkirakan bahwa jumlah orang yang dijatuhi hukuman di tahun 2019 sebanding dengan dua tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat dari laporan *Xinjiang Victims Database* yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang mendokumentasikan kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran terhadap masyarakat Xinjiang melalui website secara live.

Laporan resmi dari PBB menyatakan bahwa hak-hak dasar orang Uighur dan kelompok etnis muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas sejak 2017 dan mungkin terus dirampas hingga saat ini. Dalam hal hak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, pemerintah China tidak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada masyarakat Xinjiang, terutama etnis Uighur. Selain itu juga

⁶¹ Xinjiang Victims Database, diakses dalam <https://shahit.biz/eng/> (12/18/2023, 11:03 WIB)

berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan tergolong dalam kejahatan kemanusiaan, khususnya terhadap etnis Uighur. Bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan terorganisir dan tersistematis, dengan mendirikan kamp-kamp dimanfaatkan oleh pemerintah China sebagai tempat penahanan, penyiksaan, kerja paksa, dan penganiayaan seksual, sehingga menimbulkan kesengsaraan terhadap muslim Uighur.

Pada tahun 2017, Pemerintah China telah melakukan penahanan massal dan kampanye indoktrinasi politik terhadap warga Uighur, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, isu ini menjadi banyak perhatian dunia internasional ketika suara-suara berani dari para penyintas, anggota keluarga mereka di luar negeri, peneliti dan kelompok advokasi internasional telah mendokumentasikan secara menyeluruh serangan yang meluas dan sistematis terhadap beberapa etnis yang berada di Xinjiang khususnya etnis Uighur. Serangan tersebut mencakup penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, pengawasan massal, penganiayaan budaya dan agama, kerja paksa, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak-hak reproduksi. Jumlah korban mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut ini diagram jumlah yang mengalami kasus pelanggaran HAM dari tahun 2021 hingga 2023



Sumber: Xinjiang Victims Database (live)

Berdasarkan laporan PBB tahun 2022, Pemerintah China telah menunjukkan sedikit perubahan dalam kebijakannya terkait Xinjiang, seperti di tutupnya kamp-kamp pendidikan ulang politik. Namun belum ada pembebasan massal dari penjara, mereka jarang atau bahkan tidak berkontak sama sekali dengan anggota keluarga mereka, bahkan ada yang tidak tahu apakah orang yang mereka cintai yang ditahan secara paksa masih dalam keadaan hidup atau tidak.⁶²

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Xinjiang, terutama muslim Uighur, telah diperparah oleh penahanan dan pemaksaan ideologi. Pemerintah China terus melakukan pelanggaran HAM, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang, termasuk pelanggaran beragama yang telah menyebabkan perdebatan internasional dan pelanggaran terhadap beberapa etnis-etnis, terutama Uighur Muslim. Jenis diskriminasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kamp konsentrasi dan kerja paksa

⁶² Human Rights Watch, *Tiongkok: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Terus Mengincar Etnis Uighur*, diakses dalam <https://www.hrw.org/id/news/2023/08/31/china-unrelenting-crimes-against-humanity-targeting-uyghurs> (12/15/2023. 09.38 WIB)

Pemerintah China dengan sengaja mendirikan mendirikan kamp-kamp konsentrasi yang berada tepat di dekat kota Dabancheng, Bagian Barat China. Sejak tahun 2017, Pemerintah setempat di Xinjiang telah mendirikan kamp-kamp dengan tujuan untuk melawan aksi terorisme di wilayah tersebut. Dengan menargetkan lebih dari satu juta muslim masyarakat asli Xinjiang yang terdiri dari warga Uighur, Hui, Kazakh, Kyrgyzstan, tajik, dan Uzbek, di 1.200 kamp interniran yang dikelola oleh pemerintah daerah di Xinjiang. Penahanan yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk menghapus identitas etnis dan agama dengan dalih “pelatihan kejuruan” teknik utama yang digunakan dalam penindasan ini adalah kerja paksa.

Diperkirakan 100.000 warga Uighur, etnis Kazakh dan tahanan etnis minoritas lainnya di China bekerja dalam kondisi kerja paksa setelah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang tersebut. Di salah satu kamp interniran di Kashgar, Xinjiang, terdapat tahanan Uighur yang dipaksa bekerja untuk memproduksi tekstil. Mereka menerima gaji yang kecil, tidak diperbolehkan pergi dan terbatasnya komunikasi atau tidak sama sekali dengan anggota keluarga. Jika kunjungan dan komunikasi di perbolehkan, mereka akan diawasi secara ketat oleh petugas disana. Selain itu juga, saat tidak bekerja, para tahanan harus belajar bahasa Mandarin dan menjalani indoktrinasi ideologi.⁶³ Salah satu kasus yang terjadi di pabrik sarung tangan yang secara paksa melatih dan mempekerjakan 1.500

⁶³ Marti Flacks, *The Uyghur Forced Labor Prevention Act Goes into Effect*, diakses dalam <https://www.csis.org/analysis/uyghur-forced-labor-prevention-act-goes-effect> (4/1/2023. 06:30 WIB)

hingga 2.000 pekerja dewasa dari etnis-etnis di Xinjiang. Berdasarkan kesaksian ara

Pihak berwenang menggunakan ancaman kekerasan fisik dan seksual, juga penyiksaan untuk memaksa para tahanan bekerja, dari hasil kerja paksa ini menghasilkan produk-produk seperti pakaian, alas kaki, karpet, benang, produk makanan, dekorasi hari raya, bahan bangunan, barang elektronik, perlengkapan tidur, produk rambut, masker wajah, bahan untuk tenaga surya, dan komponen energi terbarukan lainnya, obat-obatan dan barang-barang lainnya yang digunakan di dunia usaha dan rumah tangga.⁶⁴

Pemerintah China melakukannya karena orang-orang dari etnis tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan mengancam keamanan China. Dalam kamp-kamp tersebut, orang-orang dilarang membaca kitab suci, menyanyikan lagu kebangsaan komunis, dan mengenakan hijab. Mereka juga diharuskan melakukan push up dan berlari selama lebih dari dua belas jam. Langgar undang-undang dapat mengakibatkan penyiksaan atau bahkan kehilangan nyawa.

2. Program Migrasi Etnis Han

Kebijakan migrasi etnis Han, yang sebanyak 800.000 orang Han untuk pindah ke Xinjiang pada tahun 1959-1960. Dalam aspek politik dan ekonomi, dan sosial pemerintah Xinjiang menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi dan membedakan etnis Uighur dari etnis Han. Mereka

⁶⁴ US Department of State, *Forced Labor China's Xinjiang Region*, diakses dalam <https://www.state.gov/forced-labor-in-chinas-xinjiang-region/> (12/21/2023, 18:41 WIB)

menjalani kehidupan yang layak dan mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat muslim Uighur mengalami kondisi kehidupan yang buruk, seperti kekurangan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan.⁶⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip monokultur China yang dapat bekerja di bagian pemerintahan.

Dengan cara yang sistematis, etnis Han diberikan lebih banyak kesempatan untuk sukses dibandingkan etnis Uighur, seperti dalam hal pemilihan petinggi birokrasi di Xinjiang. Selain itu, etnis Han mengontrol dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam pertambangan dan ekspor hasil bumi Xinjiang, yang mengakibatkan rasa eksploitatif dan praktik kolonial yang dirasakan oleh etnis Uighur.

Program migrasi etnis Han juga memaksa budaya dan identitas Han terhadap orang non-Han di Xinjiang. Prinsip egaliter diterapkan dalam kebijakan resmi China sesuai konstitusinya. Karena banyaknya orang Han yang datang ke Xinjiang dan jumlah orang yang tinggal di sana, bahasa lokal di Xinjiang, terutama bahasa Uighur, berada dalam bahaya. Rezim Xinjiang memaksa orang Uighur dan etnis minoritas lainnya untuk mengubah budaya dan bahasa mereka menjadi bahasa Han, yang termasuk penggunaan aksara Arab di hampir semua aspek kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah toko-toko di Xinjiang tidak lagi menggunakan bahasa Uighur.⁶⁶ Hal ini sejalan dengan kebijakan monokultural China.

⁶⁵ Zulkarnain, *Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 10,

⁶⁶ Agnieszka Joniak, *Han Migration to Xinjiang Uyghur Autonomous Region: Between state Schemes and Migrant's Strategies*, hal, 156

3. Kebijakan monokultural China

Kebijakan monokultural bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme nasional dengan memungkinkan satu negara hanya memiliki satu budaya, bahasa, dan identitas. Pada dasarnya, kebijakan ini adalah monokultural dan menghindari perbedaan budaya atau bahasa. Selain itu, kebijakan ini juga menghindari perbedaan etnis antara Uighurs. Pemerintah China terus melakukan diskriminasi terhadap orang Uighur karena tidak dapat menerima heterogenitas budaya.

4. Program pengumpulan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

Program ini dilakukan oleh pemerintah China untuk mengumpulkan seluruh hasil tes DNA dari dua belas juta jiwa warga Uighur yang ada di Xinjiang. Tes kesehatan ini wajib dilakukan oleh seluruh warga Uighur tanpa terkecuali. Rangkaian tes kesehatan ini meliputi pengumpulan sampel darah, pemindaian wajah, perekaman suara, pengumpulan stempel sidik jari, dan perekaman iris mata. Kemudian sampel DNA yang didapatkan di teliti dan didata oleh kepolisian setempat untuk dihubungkan ke *database* kependudukan Xinjiang. Program ini dilakukan dan dijalankan oleh etnis Uighur melalui *smartphone*.

5. Pembatasan kegiatan beragama

Salah satu kasus yang dengan jelas menggambarkan pelanggaran HAM oleh pemerintah Xinjiang di China khususnya terhadap etnis Uighur adalah kasus Jin Dehuai, seorang Muslim Hui yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena “perpecahan” di Prefektur Changji pada

bulan September 2018. Dalam keputusan yang diperoleh oleh *Human Rights Watch*, yaitu di pengadilan rakyat Changji memvonis Jin, 47 tahun karena “berulang kali dan ilegal” mengatur perjalanan keluar negeri untuk belajar Al-Quran, mengundang tokoh agama dari negara-negara termasuk Bangladesh dan Kyrgyzstan ke Xinjiang. Pihak berwenang menuduh Jin mempengaruhi orang lain untuk masuk dalam aliran Jamaah Tabligh, yaitu semacam gerakan dakwah Islam transnasional. Berdasarkan tuduhan tersebut, tidak ada bukti yang tersedia secara publik bahwa aktivitas Jin merupakan tindak pidana yang dapat dikenali. Namun pengadilan memutuskan bahwa aktivitasnya telah mendorong infiltrasi kekuatan agama asing di China. Memperkuat gagasan bahwa islam akan menyatukan dunia, pada akhirnya akan mendirikan kekhalifahan, dan dengan demikian membahayakan negara. Atas tindakannya tersebut, Jin dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Selain kasus Jin, Database korban Xinjiang menemukan beberapa kasus lainnya juga yaitu kasus Nebijan Ghoja Ehmet yaitu dihukum karena menghasut kebencian dan diskriminasi etnis karena mengatakan kepada orang lain “apa yang haram dan apa yang halal” dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang bisa diakses pada website *Xinjiang Victims Database*.⁶⁷

Pemerintah Xinjiang juga membuat peraturan tentang pembatasan dalam kegiatan beragama dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang

⁶⁷ Xinjiang Victims Database, diakses dalam <https://shahit.biz/eng/> (12/18/2023, 11:03 WIB)

melakukan ibadah seperti puasa maupun shalat. Mereka juga menghancurkan beberapa bangunan masjid di Xinjiang serta memberhentikan kegiatan-kegiatan masjid dari fungsi-fungsinya yang semula sebagai tempat ibadah orang muslim menjadi museum sejarah. Baik turis maupun warga lokal dilarang memotret di area masjid, walaupun dijadikan sebagai museum.

6. Pembatasan kurikulum pendidikan

Pemerintah China melarang segala bentuk pendidikan yang berkaitan dengan bahasa Uighur, bahasa Turki, atau sejarah etnis Uighur atau budaya mereka diterapkan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Xinjiang. Yang diizinkan hanya menggunakan bahasa China. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan budaya dan nilai-nilai Turki dari sejarah Uighur dan lebih menekankan bahasa dan budaya asli China. Akibatnya, orang Uighur tidak dapat mempelajari budaya dan bahasa leluhur mereka, dan mereka lebih fokus pada ideologi dan prinsip komunis China.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Kasus Pelanggaran Terhadap Masyarakat Xinjiang Khususnya Etnis Uighur

China memiliki catatan sejarah yang sangat panjang dan dinamika konflik yang cukup rumit sehingga China menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Pemerintahan China cenderung memiliki kekuatan bersikap untuk menyerang daripada bertahan. Melalui militer secara nyata mereka melakukan penyerangan

terhadap masyarakat Xinjiang khususnya etnis Uighur.⁶⁸ Xinjiang merupakan suatu daerah yang berada dalam wilayah China yang penduduknya adalah kebanyakan Turki, terutama suku Uighur mereka berkomunikasi menggunakan dialek Turki. Sejak Xinjiang menjadi bagian dari China, mereka banyak menerima diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah China bukan hanya yang disebabkan karena perbedaan budaya dan agama tetapi juga karena bentuk fisik yang berbeda dengan masyarakat asli China.

2.4.1 Faktor Budaya dan Bahasa

Etnis Uighur merupakan keturunan dari etnis Proto Turki dimana terdapat kesamaan budaya dan bahasa yang digunakan sehingga menganggap budaya dan bahasa china sebagai suatu hal yang asing. Berdasarkan sejarah seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa di tahun 1940 Xinjiang dikenal dengan negara Turkestan Timur memiliki geografi yang beragam, termasuk banyak SDA, gurun, dan pegunungan. Pada awalnya, orang Uighur dan orang dari Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan tinggal di Turkestan Timur. Karena lokasinya yang strategis, area ini menjadi pusat pertukaran ekonomi dan budaya. Kemudian di tahun 1876 China di bawah kepemimpinan Dinasti Qing melakukan invasi ke daratan Turkestan Timur dan resmi menjadi bagian dari China pada tahun 1949, Xinjiang masuk ke dalam wilayah China, kemudian menjadi wilayah otonomi Pada tahun 1955, pemerintahan menjadi komunis, dan ada keterbatasan karena perbedaan budaya. Karena perbedaan etnis mereka

⁶⁸ Meancilla, F., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). *Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uighur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok*. *Journal of International Relations*, Vol,6, No,2

dengan masyarakat asli China, orang Uighur dipaksa untuk bertahan secara budaya dari arus globalisasi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, etnis Uighur merupakan orang keturunan asli Turki yang menempati wilayah Xinjiang Khususnya etnis Uighur umumnya mereka menempati lembah Tarim, Junghun, dan Turpan, ketiga daerah tersebut dikenal dengan sebutan “Turkestan Timur”. sebagai keturunan Turki, etnis ini memiliki ciri-ciri fisik yang tidak sama dengan orang China. Etnis Uighur cenderung memiliki ciri fisik seperti orang Eropa dan memiliki badan besar dan tegap. Selain itu juga meskipun mendiami wilayah China dalam waktu yang sangat lama, Etnis Uighur memiliki budaya yang lebih erat dengan kebudayaan Asia Tengah dibandingkan dengan China.

2.4.2 Faktor Agama

Etnis Uighur atau *Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)* adalah etnis minoritas di China, namun menjadi mayoritas di Xinjiang. Etnis ini menggunakan bahasa Turki Tenggara dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Diperkirakan ada sekitar 12 juta warga Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang.⁶⁹ Etnis Muslim Uighur merupakan etnis yang unik di antara etnis lainnya. Meskipun menjadi suku mayoritas di Xinjiang etnis ini tetap saja mendapatkan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Mengingat bahwa Xinjiang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tengah sehingga kepercayaan menyerupai muslim-

⁶⁹David Brofi, *The Uighurs: Making a Nation*, diakses dalam <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.318> (12/18/2023. 16:43 WIB)

muslim di negara Asia Tengah. praktik dan budaya Xinjiang cenderung sama dengan yang ada di Kelompok etnis lainnya di Xinjiang yang memeluk agama islam seperti etnis Uighur, memiliki kesamaan kepercayaan agama praktik dan tradisi budaya yang lebih besar dengan populasi mayoritas Muslim di negara-negara Asia Tengah daripada populasi mayoritas Han di China. Mayoritas masyarakat Uighur memeluk agama islam yang mengikuti tradisi moderat sunni. Karena perbedaan agama. Perbedaan tersebutlah yang menjadi penyebab kesenjangan dan konflik etnis di Xinjiang.⁷⁰



⁷⁰ Nicola Newson, (2022) *China: Allegations of human rights abuses*, diakses dalam <https://lordslibrary.parliament.uk/china-allegations-of-human-rights-abuses/> (12/22/2023. 12:15 WIB)